

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, et al., 2022 *Pengaruh Good Governance Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di SKPD Ponorogo*. E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771.
- Ardiana Titin Eka, dkk (2022). *Pengaruh Good Governance Terhadap Keuangan Daerah Transparansi Manajemen Di Unit Kerja Daerah Ponorogo*. Jurnal Internasional Penelitian Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (IJEBA) Volume 6, Edisi 3 Tahun 2022. E-ISSN:2614-1280 P-ISSN:2662-4771
- Auditia Lucy, dkk. (2017) *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013: 21-42 ISSN 2303-0348
- Baldric, S dan Bomi, S. 2017 *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta, Stie Ykps
- Chabib Soleh. (2013). *Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung*. Fokus Media
- Coryanata, Isma. (2015). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Dadang Suwanda & Hendri Santosa. 2015. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua. Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Defitri Yulia, S. (2018). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Benefita 3(1) Februari 2018 (64-75)
- Dema Herman, D. Alamsah Nandang dkk (2021:65) *Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bantaeng* Volume 9 | Nomor 2 | Edisi Juni 2021 p-ISSN 2302-6960 e-ISSN 2716-165X. Tersedia
- Diana, Sari. (2014). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Didjaja, M.2015. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dito Aditia. 2018. *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, Volume 2, Nomor 3 2018.
- Dwiyanto, A. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23 (EDISI 8)*. Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haliah, 2015. *Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. UNHAS Makassar
- Halim, A, and Muhammad Syam Kusufi, (2014) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan*. Jakarta, Salemba Empat
- Hardiwinoto, 2017. Good Government Governance.  
<https://hardiwinoto.com/good-government-governance/>  
 (28 Desember 2023)
- Hehannusa Salomi, J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Vol. 2 No 1 May 2015, I-SSN: 2302-9791
- Humayun, Md., K and I. Adelopo. (2015) “Corporate Governance Disclosure Practices By Swaziland Public Enterprises”. *African Journal of Business Management*, 6(24), 7136-7148.
- Ignatius Edward Riantono 2014. *Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan*. Binus Business Review Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 315-322
- Loina, Lalolo Krina P. 2014. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mentu and Jullie J. Sondakh (2016). *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Vol.4 No.1 Maret 2016, 1392-1399. ISSN 2303-1174
- Mia Oktarina. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Apartur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang*. *Journal of Accounting*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2016.
- Michael E. et. al. 2021. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (M. N. Muliawati (ed). PT Remaja Rosdakarya.
- Munindro, R 2016. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mursyidi. 2015. *Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit: Refika Aditama. Bandung
- Nasution, Dito Dharma. 2018 *Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah*. ISSN: 2597-7601. Tersedia
- Nordiawan, Puta dan Rahmawati (2016) *Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Pp. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*.
- Nurmalia, H. dan Achmad, F. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: Penerbit In Media

- Pratama, Y., & Pikri, F. (2020). Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 75-86.
- Putra Hendra G, 2014 *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik*. Tersedia
- Rahmanurrasjid, Amin. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Di Ponegoro.
- Sadeli, Lili M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Sanusi, Anwar & Fadillah Putra. 2019. *Governansi Nusantara (Jejak Kosmopolitanisme Dalam Sejarah Kepemerintahan Di Indonesia)*. Depok: LP3ES.
- Sari, Diana 2018. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung, 27 Maret 2012 ISSN 2252-3936
- Sedarmayanti. 2017. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Sedarmayanti. (2015). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Bagian Ketiga*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudaryo, Yoyo.Sjarif, Devyanthi. dan Sofiati, Nunung Ayu . 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Susilo, Ghina Fitri Ariesta dan Risma Wira Bharata. 2020. *Urgensi Akuntansi Penganggaran Di Pemerintahan Indonesia*. Magelang, Jurnal TECHNOBIZ Vol. 3, No. 2, 2020, 13-17. ISSN 2655-3457.
- Suwaryo, Utang. 2017. *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Kapsipi
- Syamsul & Ritonga 2017. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi/Volume XXI, No. 03, September 2017. Tersedia
- Tundunaung Liong, dkk. (2018) *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud* Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi ISSN : 2337 – 5736
- Wulan Dary, N. 2020. Akuntansi fakultas sosial. In Akuntansi.

- Yuliana Nisa Sabrina, 2018. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Volume 5 No 2 (2018). 2614-2945. ISSN 2356-2269
- Pemerintah Indonesia 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah 2010. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Indonesia 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Pemerintah Indonesia 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah 2020. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.